BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Manusia membutuhkan manusia yang lain untuk menjalankan kehidupan. Manusia mengembangkan sarana bersifat materil yang menjadi perekat dalam hidup bermasyarakat. Sarana itu muncul dari dalam diri manusia itu sendiri, yaitu cinta kasih dan kebersamaan, bahkan dua hal itulah yang melandasi kehidupan bermasyarakat yang disebut sebagai moral¹.

Dalam sistem norma hukum di Indonesia, norma-norma hukum yang berlaku berada dalam sistem yang berlapis-lapis dan berjenjang, sekaligus berkelompok-kelompok, dimana suatu norma itu selalu berlaku, bersumber serta berdasarkan pada norma yang lebih tinggi, dan norma yang lebih tinggi berlaku bersumber serta juga berdasarkan pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma dasar negara (*Staatsfundamentalnorm*)². norma berasal dari bahasa latin, yang dalam bahasa arab disebut kaidah.

¹ Ridwan Halim, *Pengantar Ilmu Hukum* (jakarta: 2014), 46

² Ridwan Halim, *Pengantar Ilmu Hukum*, 50

Aturan-aturan tersebutlah yang menjadi acuan seseorang individu, untuk mengarahkan bagaimana dia bertingkah laku dan bersikap³. Tetapi, kemudian bagaimana mungkin untuk mengukur tindakan-tindakan atau tingkah laku tersebut sehingga bisa dikatakan sebuah norma itu telah sesuai dengan apa yang seharusnya. Dengan demikian, disinilah norma terbagi-bagi dan berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, antara lain sebagai berikut⁴:

1. Norma kesusilaan yaitu peraturan hidup yang berasal dari hati nurani manusia. Norma susila menentukan mana yang baik mana yang buruk. Norma susila yang mendorong manusia untuk kebaikan akhlak pribadinya. Norma susila melarang manusia untuk berbuat tidak baik, karena bertentangan dengan hati nurani setiap manusia yang normal.
2. Norma kesopanan yaitu ketentuan hidup yang berasal dari pergaulan dalam masyarakat. Dasar dari norma kesopanan adalah kepantasan, kebiasaan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat. Norma kesopanan sering dinamakan norma sopan santun, tata krama atau adat istiadat. Bagi mereka yang melanggar norma kesopanan, sanksi yang dijatuhkan akan menimbulkan celaan dari sesamanya.
3. Norma agama yaitu ketentuan hidup yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, yang isisnya berupa larangan, perintah-perintah, dan ajaran. Norma agama berasal dari wahyu tuhan dan mempunyai nilai yang fundamental yang mewarnai berbagai norma yang lain, seperti norma susila, norma kesopanan dan norma hukum.
4. Norma hukum yaitu ketentuan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang mempunyai sifat memaksa untuk melindungi

³ Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: 2014), 58

⁴ Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, 62

kepentingan manusia dalam pergaulan hidup di masyarakat dan mengatur tata tertib kehidupan bermasyarakat.

Jadi apabila melanggar norma tersebut maka akan dikenakan sanksi atau ancaman hukuman bagi yang melanggar norma tersebut. Bagi pelanggar norma hukum dapat dikenakan sanksi berupa pidana penjara ataupun denda maupun pembatalan atau pernyataan tidak sahnya suatu kegiatan atau perbuatan, dan sanksi tersebut dapat dipaksakan oleh penguasa atau lembaga yang berwenang. Setiap penetapan dilakukan dengan sangat hati-hati dan selalu memperhatikan dampak kemaslahatan dan kemudhoratannya seperti.

Menurut Manouvier kejahatan lebih banyak disebabkan oleh milieu atau lingkungan dimana manusia yang bersangkutan itu hidup⁵. Pengaruh lingkungan inilah yang menurutnya banyak mempengaruhi sikap jahat seseorang. Terdapat beberapa teori lain yang menitikberatkan pada kondisi individu penjahat, antara lain⁶:

- a. Teori Psikis, dimana sebab-sebab kejahatan dihubungkan dengan kondisi kejiwaan seseorang. Sarana yang digunakan adalah tes-tes mentang seperti IQ. Jadi penjahat menurut teori ini adalah orang-orang yang memiliki keterbelakangan mental atau bodoh.
- b. Teori yang menyatakan bahwa penjahat memiliki bakat yang diwariskan oleh orang tuanya. Pada mulanya amat mudah

⁵ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), 49

⁶ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, 58

mendapati anak yang memiliki karakter seperti orang tuanya, namun ternyata hasil yang sama pun tidak jarang ditemui pada anak-anak yang diadopsi atau anak-anak angkat.

- c. Teori Psikopat berbeda dengan teori-teori yang menekankan pada intelegensi ataupun kekuatan mental pelaku, teori psikopati mencari sebab-sebab kejahatan dari kondisi jiwanya yang abnormal. Seorang penjahat di sini terkadang tidak memiliki kesadarannya atas kejahatan yang telah diperbuatannya sebagai akibat gangguan jiwanya.
- d. Teori bahwa kejahatan sebagai gangguan kepribadian sempat digunakan di Amerika untuk menjelaskan beberapa perilaku yang dikategorikan sebagai *crime without victim* (kejahatan tanpa korban) seperti pemabuk, gelandangan, perjudian, prostitusi penggunaan obat bius.

Pencuri ialah orang yang mengambil benda atau barang milik orang lain secara diam-diam untuk dimiliki. Sementara pencurian merupakan prosesnya atau perbuatannya. Pencurian merupakan salah satu perbuatan yang tidak dibenarkan di dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia⁷. Pencurian perbuatan dengan mengambil harta atau hak orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi tanpa adanya izin dari pemilik.

Berdasarkan beberapa kasus pencurian yang terjadi, ada sebuah tindakan mengambil barang orang lain secara sembunyi-sembunyi yang berbeda dengan tindakan pencurian biasa. *Kleptomania* merupakan dorongan hati untuk mencuri milik harta orang lain demi kepuasan hatinya, tentang mencuri itu bukan hasil yang di curi. Tindakan pencurian tersebut

⁷ Zinuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 62

terjadi karena pelakunya memiliki suatu gangguan kendali impuls gangguan itu disebut *kleptomania* .

Teori Capelli yang didukung oleh J. Large Kurt Scheneider menyatakan bahwa “kejahatan itu dapat terjadi karena di dorong oleh faktor psikologis dengan para pelakunya orang-orang yang sakit jiwanya dan orang-orang yang berjiwa abnormal tetapi tidak sakit jiwa”⁸. Kejahatan dengan sebab psikologi ini menyatakan adanya kelalaian yang bersifat psikis, sebab kecenderungan untuk melakukan tindakan kejahatan, seperti pencurian yang dilakukan oleh seseorang yang terganggu jiwanya secara fungsional disebabkan adanya sistem syaraf, tetapi kerusakan itu tidak seluruhnya melalaikan tetapi hanya sebagian kepribadian saja. Pencurian tersebut dilakukan karena adanya dorongan emosi yang tidak dapat ditahan dan merasa tidak melakukannya, dalam ilmu jiwa keadaan tersebut dinamakan kleptomania.

Sebagaimana halnya adapun banyak peristiwa kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang mengidap penyakit kejiwaan diantaranya ialah ⁹:

⁸ Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi Sosial*, 73

⁹ Hendy F Kurniawan, dokter ryan helmy penempak istrinya di klinik <http://www.tribunnews.com/metropolitan/2018/08/07/dokter-ryan-helmy-penembak-istrinya-di-klinik-divonis-hukuman-penjara-seumur-hidup>, (diakses pada tanggal 3 february 2019 pada pukul 15:49 WIB)

1. *Pedofilia*

Reskrim polda jambi kembali menemukan bukti baru belasan video korban *pedofilia* yang direkam tersangka toni alias Angel (28). Jumlah korban yang semula diakui sebanyak 80 anak, kini bertambah menjadi 87 anak yang tersebar di sembilan provinsi. Tersangka di tangkap di salah satu hotel di kawasan pasar kota Jambi saat sedang bersama korban kamis (14/10/2018).

2. *Eksibisionisme*

Kapolres karawang, AKBP Nuredy Irwansyah Putra memastikan jika pihaknya akan mengusut penyimpangan *eksibisionisme* (onani) atau menunjukkan alat kelamin kepada disekitaran lingkungan SMPN 1 Karawang Barat. Kasus yang para siswa mencemaskan para siswa dan guru di wilayah Karawang dilakukan pria tak dikenal yang sampai saat ini masih dalam proses penyelidikan.

3. *Skizofrenia*

Kasus kekejaman dr Ryan Helmi yang menembak istrinya, dr Letty sorang dokter disebuah klinik di Jakarta Timur hingga nyawanya melayang. Menurut keterangan polisi, pelaku mengaku melakukan penembakan itu di karenakan adanya suatu "bisikan". Sementara ini yang bersangkutan mengaku ada bisikan untuk membunuh istrinya kata kasubdit jatanras ditreskrimum polda metro jaya AKBP Hendy Kurniawan pada kamis (9/11/2017).

Dari pengertiannya dapat peneliti pahami bahwa *kleptomania* perbuatan mengambil barang orang lain yang dilakukan karena dorongan dari dalam diri, pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa di pertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau

tidak¹⁰. Di Indonesia kasus *kleptomania* sudah tidak asing lagi, namun tetap ada beberapa orang yang masih belum tahu atau belum sadar dengan keberadaan *kleptomania*.

Mencuri yang dilakukan oleh para pengidap *kleptomania* atau tidak mengidap *kleptomania* pada dasarnya adalah sama. Akan tetapi penyakit *kleptomania* juga menyangkut penyakit jiwa. Yang cukup menarik disini bagaimana hubungannya dengan penderita *kleptomania* yang melakukan pencurian sedangkan jiwa dan psikisnya terganggu (tidak sehat) , apakah ia dapat dikenakan pertanggungjawaban apabila yang melakukan adalah seorang penderita *kleptomania*. Dari uraian diatas, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul skripsi yang berjudul :**Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pertanggungjawaban Bagi Pelaku Pencurian Pengidap *Kleptomania*.**

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini akan dikemukakan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban bagi pelaku tindak pidana pencurian Pengidap *kleptomania* menurut hukum Positif ?

¹⁰ Zaidan Ali, *Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika), 82

2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap pertanggungjawaban bagi pelaku tindak pidana pencurian Pengidap *kleptomania* ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Pencurian Pengidap *Kleptomania*.
- b. Untuk mengetahui Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Pencurian Pengidap *Kleptomania*.

D. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teoritis
Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang tindak pidana Pertanggungjawaban pencurian Pengidap *Kleptomania*.
- b. Secara Praktis
Sebagai referensi bagi aparat penegak hukum yang berhubungan dengan tindak pidana Pertanggungjawaban pencurian Pengidap *Kleptomania*.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini, peneliti akan memaparkan beberapa kajian terdahulu atau penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Adapun tujuan dari pemaparan kajian terdahulu ini adalah untuk menentukan posisi peneliti serta menjelaskan perbedaannya. Selain itu penelitian terdahulu ini sangat berguna untuk perbandingan. Adapun penelitian terdahulu yang peneliti maksud adalah:

1. Skripsi yang berjudul : “ *Bimbingan Konseling Islam Terhadap Anak Kleptomania Studi kasus terhadap Lima anak Kleptomania di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman Yogyakarta* “ oleh Dwi Anis Chotimah. Dalam penelitian¹¹. Penelitian lebih memfokuskan pada bimbingan konseling terhadap anak *kleptomania* yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan klas IIB Sleman.
2. Skripsi yang berjudul : “ *Tinjauan Yuridis Tentang Pidanaan Terhadap Anak Kleptomania* “ oleh Tony Suryantoro mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta pada tahun 2014¹² . penelitian yang dilakukan oleh Tony Surtantoro

¹¹ Dwi Anis Chotimah, Skripsi: Bimbingan Konseling Islam terhadap Anak Kleptomania di Lembaga Pemasyarakatan (universitas islam negeri sunan kalijaga, 2010)

¹² Tony Suryantoro, Skripsi: Tinjauan Yuridis tentang Pidanaan terhadap Anak Kleptomania (universitas atma jaya, 2014)

ini berfokus pada tinjauan yuridis tentang pemidanaan terhadap anak *kleptomania* .

Sebagaimana yang peneliti jelaskan di muka bahwa dengan adanya penelitian terdahulu ini, dimaksudkan untuk memperjelas posisi penelitian yang peneliti lakukan. Dan penelitian yang peneliti lakukan ini mempunyai titik perbedaan dengan penelitian terdahulu. Meskipun demikian, peneliti mengakui tentang teori yang digunakan dalam penelitian ini mempunyai persamaan teori oleh satu peneliti terdahulu.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan hal yang cukup penting untuk mencapai tujuan dari penelitian itu sendiri. Untuk mendapatkan data-data yang jelas dan ketajaman dalam menganalisis, metode yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu bentuk penelitian yang datanya diperoleh dari pustaka¹³.

2. Sumber Data

¹³Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2008), 12

Dalam penelitian hukum pada umumnya peneliti menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan sekunder. Adapun dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh oleh peneliti dari sumber yang sudah ada, yang berkaitan dengan pertanggungjawaban bagi pelaku pencurian pengidap *kleptomania*.

Dalam rangka untuk mendapatkan data sekunder penulis menggunakan pendekatan sumber bahan hukum:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, Undang-Undang Dasar, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Fiqh Jinayah, Al-Qur'an dan Hadis.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan terhadap bahan hukum primer, misalnya: Tafsir Qur'an dan hadis mengenai pertanggungjawaban bagi pelaku pencurian pengidap *kleptomania*.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya: buku-buku lain yang berkaitan dengan masalah yang dikaji, penelitian-penelitian, hasil karya kalangan hukum, serta sumber data dari media *online* yang berhubungan dengan masalah yang dibahas peneliti.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan metode pengumpulan data yang tergantung pada jenis dan sumber data yang diperlukan. Mengingat penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan melalui kajian kepustakaan. Dalam penelitian ini penulis meneliti data-data yang berhubungan dengan penelitian mengenai Pertanggungjawaban Pidana Pencurian Pengidap *Kleptomania* dari Al-Qur'an, Hadis, penjelasan Undang-Undang dan sumber data yang lain yang terkait.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan metode *deskriptif kualitatif*, yakni dengan menyajikan, menggambarkan, atau menguraikan sejelas-jelasnya seluruh masalah yang ada pada rumusan masalah, secara sistematis, faktual dan akurat¹⁴. Kemudian pembahasan ini disimpulkan secara *deduktif* yakni dengan menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke khusus sehingga penyajian hasil penelitian dapat di pahami dengan mudah.

I. Sistematika Penulisan

¹⁴Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: rajawali Perss, 2006), 53

Sistematika skripsi adalah urutan berfikir yang menggambarkan proses penulisan skripsi, mempermudah mencari laporan penelitian ini perlu adanya sistematika penulisan. Sistematika juga penting dikemukakan untuk mempermudah pembaca dalam memahami alur berfikir penulis sehingga pembaca mengetahui dari awal tentang permasalahan yang diteliti hingga penutup.

Penulisan ini tersusun secara sistematika didalam bab yang menegtegahkan permasalahan secara berbeda-beda, tetapi merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan, skripsi ini disajikan dalam empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data dan Sistematika Penulisan untuk memberikan pemahaman terhadap isi penelitian ini secara garis besar.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai tinjauan umum tentang Pengertian Tindak Pidana, Unsur-unsur Tindak Pidana, Bentuk-Bentuk Tindak Pidana, Pengertian Pencurian, Unsur-unsur Pencurian,

Pengertian *Kleptomania*, Ciri-ciri *Kleptomania*, Gejala-gejala *Kleptomania*, Perilaku dan Faktor yang mempengaruhi *Kleptomania* dan Perbedaan *Kleptomania* dengan Pencuri Biasa.

BAB III : PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Pencurian Pengidap *Kleptomania* Menurut Hukum Positif, dan Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Pencurian Pengidap *Kleptomania*.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini merupakan Kesimpulan dan Saran.